

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada triwulan IV yang berlangsung dari bulan Oktober – Desember 2025, bertepatan dengan jatuhnya HBKN Natal dan Tahun Baru. Dimana terjadi lonjakan permintaan bahan komoditi pokok dan penting. Namun pada triwulan IV ini Kabupaten Natuna bisa mengakomodir dengan baik sehingga tidak terjadi lonjakan harga signifikan, bahkan cenderung stabil dan ada beberapa komoditas seperti gula, minyak dan cabe merah mengalami kenaikan harga.

Berikut daftar harga barang kebutuhan pokok dan penting pada triwulan IV di Kabupaten Natuna:

No	Komoditi	Oktober	November	Desember	Perubahan Harga (%)
1	Beras	16,250	16,250	16,250	-
2	Gula	17,000	16,571	16,643	- 0.02
3	Minyak Goreng	18,615	18,358	18,538	- 0.00
4	Tepung Terigu	15,000	15,000	14,857	- 0.01
5	Daging	140,000	140,000	140,000	-
6	Telur Ayam Ras	59,500	59,786	59,857	0.01
7	Cabe Merah	68,077	67,692	69,231	0.02
8	Bawang Merah Jawa	39,929	38,857	39,214	- 0.02
9	Kacang Kedelai	14,200	14,000	14,000	- 0.01

Dari data stok ketersediaan bahan pangan strategis pada triwulan IV menunjukkan bahwa kebutuhan beras dan gula sudah terpenuhi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan angka ketersediaan beras melebihi angka kebutuhan. Berikut neraca kebutuhan barang pokok dan penting di Kabupaten Natuna:

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan IV tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Natuna menghadapi beberapa permasalahan dalam Pengendalian Inflasi Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Natuna Bukan Daerah Penghasil

Sehingga ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah (Batam, Tanjungpinang, Pontianak dan Jakarta). Kondisi ini menyebabkan harga mudah bergejolak ketika terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga di daerah pemasok.

2. Keterbatasan Transportasi dan Tingginya Biaya Logistik									
No	Komoditas	Ketersediaan (ton)			Kebutuhan (ton)			Neraca (ton)	
1.	Beras	1433,82	1398,76	1346,01	492,07	476,20	492,55	941,75	922,56
2.	Gula	26,28	27,67	27,67	82,26	79,61	82,51	-55,98	-51,94
3.	Minyak Goreng	26,28	27,67	27,67	82,26	79,61	82,51	-55,98	-51,94
4.	Daging Ayam Ras	1,99	3,01	3,01	3,51	3,40	3,54	-1,52	-0,39
5.	Terbatasnya Produksi Pangan Lokal	11,29	10,93	11,34	0,98	7,58	7,17		
6.	Bawang Merah	2,85	2,19	2,19	22,20	21,49	22,23	-19,35	-19,30
7.	Bawang Putih	2,85	2,19	2,19	22,20	21,49	22,23	-19,35	-19,30

Faktor geografis kepulauan menyebabkan distribusi barang sangat bergantung pada transportasi laut dan udara. Pada Triwulan IV, kondisi cuaca ekstrem (gelombang tinggi dan angin utara) sering menghambat kelancaran distribusi, sehingga berdampak pada keterlambatan pasokan dan kenaikan harga.

Beberapa komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan daging ayam ras mengalami fluktuasi harga akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah. Produk lokal yang belum mampu memenuhi kebutuhan dan peningkatan permintaan menjelang akhir tahun dan hari besar keagamaan.

Produksi pertanian, peternakan, dan hortikultura lokal masih berskala kecil dan belum berkelanjutan. Hal ini menyebabkan ketahanan pangan daerah belum kuat dan inflasi rentan dipicu oleh gangguan pasokan.

Kenaikan Permintaan Menjelang Akhir Tahun

Pada Triwulan IV terjadi peningkatan konsumsi masyarakat seiring dengan perayaan hari besar keagamaan, libur akhir tahun, peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi.

Kondisi ini mendorong kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, khususnya makanan dan minuman.

6. Kapasitas penyimpanan

Untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, kebutuhan pokok masyarakat maka diperlukan dukungan infrastruktur berupa gudang di setiap Kecamatan di Kabupaten Natuna untuk mengantisipasi kendala ketersediaan pasokan ketika terjadi gangguan dalam pendistribusian barang dari daerah asal akibat jangka waktu pengiriman yang lama ataupun karena faktor cuaca.

7. Koordinasi Distribusi Antarwilayah yang Perlu Diperkuat

Kerja sama antar daerah pemasok dan koordinasi distribusi masih perlu ditingkatkan agar pasokan komoditas strategis lebih terjamin, terutama pada periode rawan inflasi.

8. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem musim Utara masih berlangsung pada triwulan ke IV ini, hal ini menyebabkan nelayan tidak bisa melaut menyebabkan angin kencang menerjang Kabupaten Natuna mengakibatkan harga ikan mengalami kenaikan dan terhambatnya pasokan barang kebutuhan pokok.

9. Pertanian

Pertanian di Kabupaten Natuna masih minim, masyarakat masih bergantung dari hasil nelayan. Padahal luas dataran Kabupaten Natuna cukup luas dan masih banyak lahan kosong yang belum dimanfaatkan.

10. Ketersediaan anggaran yang minim terutama sekali pada OPD terkait sehingga capaian realisasi kinerja terhambat terutama sekali dalam pelaksanaan Kegiatan Bazar Pangan Murah, Operasi Pasar Murah dan Pelaksanaan rapat dan koordinasi dengan pihak-pihak dan lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan lain-lain.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah strategis pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pelaksanaan kebijakan difokuskan pada empat pilar utama, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pasokan

5.

Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui:

- Penguatan koordinasi dengan daerah pemasok utama seperti Batam dan Tanjungpinang untuk menjamin kontinuitas pasokan pangan strategis.
- Dukungan terhadap peningkatan produksi pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan, kegiatan pertanian terpadu, serta pengembangan komoditas hortikultura skala rumah tangga.
- Melaksanakan Koordinasi terkait Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan penting di beberapa Kecamatan dan Pengawasan Bahan Pokok dan Penting oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi.
- Monitoring dan Koordinasi BBM di beberapa Kecamatan pada bulan Oktober sampai dengan Desember
- Penyerahan 750 bibit cabai kepada 15 kelompok tani di Kecamatan Bunguran Tengah Penyerahan dilakukan langsung di Desa Tapau dalam rangka mendukung meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga kemandirian pangan daerah.
- Penyerahan satu unit traktor roda 4 kepada Kelompok Tunas Baru di Kecamatan Bunguran Tengah pada Selasa, 2 Desember 2025, Bantuan tersebut merupakan bagian dari program sinergi pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Natuna dengan Bank Indonesia (BI) khusus untuk memperkuat mekanisasi pertanian di Kabupaten Natuna.

2. Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

- Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah pada periode rawan inflasi, khususnya menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun.
- Pengawasan harga di pasar tradisional dan swalayan serta took-toko untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar.
- Fasilitasi stabilisasi harga komoditas tertentu melalui intervensi pasar bekerja sama dengan Bulog dan distributor.

3. Kelancaran Distribusi

Untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan menekan biaya logistik, Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan:

- Koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan dan pelaku usaha transportasi laut guna mengantisipasi gangguan distribusi akibat kondisi cuaca ekstrem.
- Bupati Natuna Cen Sui Lan meninjau langsung proses bongkar muat penumpang dan kendaraan Kapal Roro di Pelabuhan Roro Penagi, Kecamatan Bunguran Timur, pada hari Rabu Tanggal 24 Desember 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran, kenyamanan, serta keamanan masyarakat selama arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
- Pemantauan arus distribusi barang dari daerah pemasok ke pasar-pasar di Kabupaten Natuna.
- Upaya percepatan distribusi barang kebutuhan pokok pada saat terjadi keterlambatan pasokan akibat faktor alam.

4. Komunikasi Efektif

Dalam mendukung efektivitas pengendalian inflasi, TPID Kabupaten Natuna memperkuat aspek komunikasi melalui:

- Pelaksanaan rapat koordinasi TPID secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan harga dan pasokan.
- Penyampaian informasi harga dan ketersediaan barang kepada masyarakat melalui media informasi daerah.
- Edukasi kepada masyarakat terkait pola konsumsi bijak dan pemanfaatan produk lokal.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Natuna pada Triwulan IV Tahun 2025 secara umum berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan geografis. Evaluasi kebijakan dilakukan terhadap capaian dan kendala berdasarkan kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

1. Ketersediaan Pasokan

Kebijakan menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok menunjukkan hasil yang relatif stabil. Koordinasi dengan daerah pemasok dan pelaku distribusi mampu menjaga stok komoditas pangan strategis tetap tersedia hingga akhir tahun. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan dari luar daerah masih menjadi kelemahan utama, sehingga potensi gejolak harga tetap tinggi apabila terjadi gangguan distribusi. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatkan penangkapan ikan, dan budidaya ikan. Masyarakat perlu dilakukan pendampingan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, baik budidaya maupun tangkap.

2. Keterjangkauan Harga

Upaya menjaga keterjangkauan harga melalui operasi pasar murah dan pengawasan harga di pasar Ranai dinilai cukup efektif dalam menahan lonjakan harga, khususnya menjelang hari besar keagamaan dan libur akhir tahun. Meski demikian, fluktuasi harga pada komoditas tertentu seperti cabai, bawang, dan telur ayam ras masih terjadi akibat keterbatasan pasokan dan peningkatan permintaan musiman.

3. Kelancaran Distribusi

Kebijakan pengendalian inflasi pada aspek distribusi menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama akibat kondisi geografis kepulauan dan faktor cuaca ekstrem pada Triwulan IV. Gangguan transportasi laut berdampak pada keterlambatan pasokan dan peningkatan biaya logistik. Meskipun koordinasi lintas sektor telah dilakukan, efektivitas distribusi masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem logistik dan sarana pendukung. Perlu dilakukan kerjasama dengan daerah lain untuk menampung hasil pertanian dan nelayan agar masyarakat memiliki daya dorong untuk semakin maju lagi dalam meningkatkan hasil pertanian dan perikanan.

4. Komunikasi Efektif

Aspek komunikasi dinilai semakin baik melalui pelaksanaan rapat koordinasi TPID secara rutin dan penyampaian informasi perkembangan harga kepada masyarakat. Namun, pemanfaatan sistem pemantauan harga berbasis data real-time masih perlu dioptimalkan agar respon kebijakan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Rapat koordinasi yang dilakukan tim TPID sudah sangat baik namun perlu dimaksimalkan. Pemerintah Daerah perlu memperkuat sinergi dengan seluruh pihak baik TNI, Polri, lembaga BUMD, BUMN dan pengusaha untuk bekerja sama dalam menekan inflasi daerah dalam menghadapi cuaca eksterem yaitu musim utara yang berlangsung dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Natuna, maka merekomendasikan beberapa kebijakan Pengendalian Inflasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai berikut :

1. Penguatan Koordinasi Distribusi Antarwilayah

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memperkuat koordinasi distribusi barang kebutuhan pokok antar kabupaten/kota, terutama dari daerah surplus ke Kabupaten Natuna, guna menjamin kelancaran pasokan dan stabilitas harga.

2. Dukungan Subsidi Transportasi dan Logistik

Pemerintah Provinsi dan Pusat diharapkan dapat memberikan dukungan subsidi transportasi laut/logistik untuk komoditas pangan strategis menuju wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Kabupaten Natuna, guna menekan biaya distribusi dan disparitas harga melalui subsidi angkutan laut.

3. Penguatan Cadangan Pangan Provinsi dan Penguatan Sistem Pemantauan Harga Terpadu

Diperlukan penguatan peran cadangan pangan provinsi yang dapat dimobilisasi secara cepat ke Kabupaten Natuna pada periode rawan inflasi atau saat terjadi gangguan distribusi. Pemerintah Provinsi diharapkan mengintegrasikan sistem pemantauan harga antar daerah kabupaten/kota agar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

4. Dukungan Anggaran dan Program Stabilisasi Harga

Diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan operasi pasar, pasar murah, dan program stabilisasi harga komoditas pangan strategis di daerah dengan tingkat kerawanan inflasi tinggi.

5. Penguatan Peran Bulog di Daerah Terpencil

Diharapkan kepada Pemerintah Pusat melalui Bulog untuk membangun gudang di beberapa Kecamatan terluar di Kabupaten Natuna seperti Serasan, Subi dan Pulau Laut dikarenakan kondisi geografis Natuna yang terdiri atas Pulau-pulau sehingga terbatasnya fasilitas penyimpanan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan

pokok di wilayah perbatasan.

6. Peningkatan Infrastruktur Logistik dan Transportasi

Diperlukan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi laut, pelabuhan, dan fasilitas logistik pendukung di wilayah Natuna guna memperlancar distribusi barang dan menurunkan biaya logistik.

7. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat mengalokasikan dukungan dana melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan fasilitas Cool Storage (pendingin dan penyimpanan) dalam menjaga kualitas hasil perikanan, pertanian maupun pangan segar lainnya tetap awet dan tidak cepat rusak.
8. Pemerintah Pusat diharapkan dapat mengintegrasikan Kabupaten Natuna ke dalam program nasional ketahanan pangan dengan pendekatan berbasis potensi lokal, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap.
9. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dapat merekomendasikan penambahan maskapai atau menambah rute penerbangan dari dan keluar Natuna terutama sekali untuk penerbangan Pontianak Natuna dan Natuna Pontianak. Dimana untuk saat ini hanya terdapat 2 maskapai yaitu Wings Air dan Nam Air dengan rute penerbangan hanya Batam Natuna dan Natuna Batam.